

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Moehammad Izzan Ismail Rangkuti

NPP. 31.0075

*Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: 31.0075@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of the non-cash food assistance policy in Medan City aims to reduce the poverty rate in the city. The problem with the distribution of Non-Cash Food Aid in the city of Medan is that much of the aid distributed is not on target so that many people do not receive the aid. **Purpose:** This study intends to investigate the implementation of the non-cash food assistance program in Medan City. **Method:** The research adopts a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Six informants were selected for the study using purposive sampling. **Results/Findings:** The research findings on the implementation of the direct non-cash food assistance program in Medan City consist of six sub-indicators. First, the policy targets the interests of the poor and vulnerable populations. Second, the benefits derived from stakeholders and the poor community are deemed very good. Third, the program implementation is evaluated as effective and on target. Fourth, decision-making authority is established in accordance with existing rules and regulations. Fifth, the resources involved are categorized into infrastructure and human resources. Sixth, compliance and responsiveness generated by the program receive positive responses, with the community welcoming it and meeting the requirements to receive non-cash food assistance. **Conclusion:** The distribution of Non-Cash Food Assistance is still not optimal/on target so there are still many people who have not received this assistance.

Keywords: Implementation, Poverty, Community, Direct Non Cash Food Assistance

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai di kota medan yaitu mengimplementasikan kebijakan program bantuan pangan non tunai di kota medan dari pengimplementasian itu kota dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan yang ada di kota medan. Permasalahan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di kota Medan adalah masih banyaknya bantuan yang disalurkan belum tepat sasaran sehingga banyak Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di kota medan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini terdiri dari 6 (Enam) orang yang ditentukan menggunakan purposive sampling. **Hasil/Temuan:** penelitian Implementasi kebijakan program bantuan langsung non tunai di kota medan, terdiri dari enam sub indikator yaitu (1) Kepentingan yang dipengaruhi dari kebijakan program bantuan langsung non tunai adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. (2) Tipe manfaat yang dihasilkan dari stakeholder dan masyarakat miskin sangat baik. (3) Pelaksanaan program dinilai sudah dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. (4) Letak pengambilan keputusan dalam hal ini sudah ditetapkan sesuai aturan atau regulasi yang ada. (5) Sumber daya yang dilibatkan, terbagi menjadi dua yaitu sumber daya sarana prasarana dan sumber daya manusia. (6) Kepatuhan dan daya tanggap yang dihasilkan dari program ini berespon positif yaitu masyarakat menyambut baik dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai. **Kesimpulan:** Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini masih belum optimal/ tepat sasaran sehingga masih banyaknya Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Masyarakat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang masih dalam tahap perkembangan yang menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Tantangan-tantangan ini meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar oleh masyarakat, permasalahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta berbagai isu lainnya (Yulianto,2022). Kehadiran Pemerintah sebagai personifikasi Negara untuk mewujudkan amanah konstitusi dalam upaya menyejahterakan rakyat (Baharuddin,2019). Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian sosial dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan ini

menjadi dasar pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021) Pemerintah Kota Medan mengimplementasikan Upaya ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 Perpres. (2015). Permensos Nomor 5 Tahun 2021 tersebut dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, dengan tujuan agar program yang dibuat dapat mencapai target yang tepat dan mencegah penyalahgunaan dana yang disalurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Perwal Nomor 22 Tahun 2022, n.d.) Peraturan ini dirancang untuk meminimalkan peluang bagi individu yang tidak berhak untuk menerima manfaat dari program tersebut. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya keteraturan administratif antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kota Medan merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, dan karena Kota Medan merupakan ibukota provinsi yang daerahnya lebih maju dan jumlah masyarakatnya lebih tinggi dari kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Lebih dari 50% penduduk miskin masih belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (BPS Kota Medan, 2023), artinya terjadi ketidaktepatan sasaran dalam pemberian BPNT di Kota Medan. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi mengenai program ini melalui berbagai cara, agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif. Sangat disayangkan jika program yang memiliki potensi positif tapi tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan informasi awal yang peneliti terima dari pegawai dinas sosial Kota Medan, terdapat beberapa permasalahan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap penduduk miskin di Kota Medan seperti keterlambatan pendistribusian dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penyaluran BPNT yang tidak mencapai target yang tepat menjadikan masyarakat miskin yang termasuk ke dalam kategori penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dirugikan (Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Medan, 2024).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Populasi jumlah penduduk miskin di Kota Medan tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara dan menjadi objek utama diadakannya penelitian ini, kemiskinan di

Kota Medan harus segera diatasi dengan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar mampu memberikan dorongan ekonomi kepada penduduk miskin tersebut. Tetapi faktanya, berdasarkan data BPS Kota Medan, bahwa ketidakmaksimalan dalam jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya merasakan manfaat dari program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka karena hanya sekitar 30% masyarakat miskin Kota Medan yang menerima BPNT. Berdasarkan informasi awal yang peneliti terima dari pegawai dinas sosial Kota Medan, terdapat beberapa permasalahan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap penduduk miskin di Kota Medan seperti keterlambatan pendistribusian dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penyaluran BPNT yang tidak mencapai target yang tepat menjadikan masyarakat miskin yang termasuk ke dalam kategori penerima BPNT dirugikan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah, 2020) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kehadiran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang telah membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menggunakan transaksi nontunai, program e-Warong. Selain itu, BPNT juga memberikan kontribusi positif terhadap aspek ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang awalnya merupakan beban keuangan yang sulit bagi masyarakat yang kurang mampu. Kedua, (Nurmalita Sari, 2020) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Studi di Kelurahan Sungailiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterapkan di Kelurahan Sungailiat diarahkan kepada penduduk dengan tingkat pendapatan rendah yang telah terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DTKS), sehingga program ini dianggap berhasil menjangkau sasaran yang tepat. Keberhasilan ini didukung oleh monitoring langsung yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan mesin EDC, keuangan, dan ketersediaan dana yang memengaruhi pencapaian tujuan dan ukuran kebijakan.

Namun, positifnya, implementor memiliki sikap baik dan melayani KPM dengan ramah. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang mendukung juga memengaruhi program bantuan, seperti di desa Bulaklo, di mana banyak melakukan demonstrasi karena program belum tepat sasaran. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Yunus, 2019) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Hasil penelitian ini terdapat Tujuan program BPNT, khususnya dalam hal ketepatan sasaran dan penerimaan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), belum tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang belum optimal, terutama karena banyaknya KPM dengan tingkat pendidikan rendah atau buta huruf. Akibatnya, proses penyaluran program BPNT menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Idzhar Nurcahyo, 2019) Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala BPNT yang membuatnya belum optimal, terutama dalam hal sumber daya dan pelaksanaan program. Faktor pendukung meliputi adanya peraturan yang jelas dan partisipasi aktif pelaksana program. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat seperti masyarakat miskin yang belum menerima bantuan, gangguan yang sering terjadi pada mesin EDC, dan KKS yang terblokir. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi BPNT diperlukan upaya penanggulangan terhadap hambatan-hambatan tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya berfokus secara khusus pada permasalahan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan yang masih belum tepat sasaran, sekitar hampir 50% masyarakat miskin di Kota Medan yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga masyarakat miskin yang seharusnya masuk ke dalam kategori penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merasa dirugikan dan terdapat keterlambatan pendistribusian dana BPNT di Kota Medan. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan pendekatan. Hasil penelitian yang disajikan berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang memiliki empat indikator yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan, kemudian untuk mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan. Serta untuk mendeskripsikan bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Waris, 2022). Menurut (Sugiyono, 2010) Metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Dalam pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap 7 orang informan yang dipilih dengan metode *Purposive Sampling*, terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan, dan 3 orang masyarakat penerima BPNT. Kegiatan dalam analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, peneliti berupaya menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada bab 1, yakni mengenai bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini melibatkan identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, serta menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

3.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

dengan menggunakan teori George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Medan sebagai implementor, belum mencapai hasil yang optimal. Karena walaupun proses penyampaian informasi mengenai program bantuan pangan non tunai melalui tahap sosialisasi dilakukan kepada setiap perangkat daerah oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Fakir Miskin, kemudian sosialisasi kepada setiap kelurahan dan kecamatan, tetapi masih banyaknya informasi dan sosialisasi yang belum tersebar luas kepada masyarakat miskin secara langsung, yang sebenarnya merupakan hal yang penting agar masyarakat tersebut tau apa program tersebut.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dukungan sumber daya di Dinas Sosial telah dinyatakan baik, terutama dalam hal sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan yang telah memenuhi standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pembagian tugas dan fungsi juga telah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai melalui Dana Alokasi Non Fisik, kondisi finansial yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program tersebut dianggap memadai karena anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut dapat terpenuhi oleh pemerintah pusat.

3. Disposisi

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti terhadap disposisi telah menunjukkan Sikap dari para pelaksana kebijakan dalam mendukung program Bantuan Pangan Non Tunai telah menunjukkan kemauan, kemampuan, dan tanggung jawab yang memadai. Sikap implementor juga dapat dipengaruhi oleh insentif atau keuntungan yang mereka peroleh, yang dapat meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa pembagian tugas telah ditetapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas berjalan lancar tanpa adanya tumpang tindih dalam program BPNT. Namun, meskipun SOP telah diterapkan, masih ada kemungkinan terjadi kendala, seperti kesulitan dalam penginputan data yang seringkali disebabkan oleh kurangnya dokumentasi dan dokumen pendukung untuk penilaian.

3.2 Faktor Pendukung

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor pendukung ini menjadi pendorong yang efektif bagi kesuksesan program. Dengan memahami dan memanfaatkan dengan baik faktor-faktor pendukung ini, diharapkan program dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa faktor pendukung yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai:

1. Adanya Regulasi yang Mengatur

Peneliti menemukan bahwa adanya regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan bantuan sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas, para pihak terlibat dapat memahami tanggung jawab mereka dengan lebih baik, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan menjalankan program secara lebih teratur dan efisien. Regulasi ini juga berperan dalam memastikan konsistensi dan kelangsungan program dari waktu ke waktu.

2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang Memadai

Menurut wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, keterlibatan instansi lain dan berbagai lembaga swadaya masyarakat sangat berperan dalam mendukung kesuksesan program ini. Koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait juga menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan program BPNT. Selain itu, implementor atau pelaksana kebijakan BPNT di Dinas Sosial telah dilengkapi dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan, yang sangat berpengaruh dalam

menentukan keberhasilan program. Selain implementor, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting sebagai pelaksana program dan penerima manfaat. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, tujuan utama dari Program BPNT dapat tercapai dengan baik.

3.2 Faktor Penghambat

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan adalah:

1. Sosialisasi yang Belum Optimal

Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, sosialisasi program belum optimal, karena belum mencapai secara langsung masyarakat, yang sebenarnya menjadi prioritas dalam memberikan pemahaman. Hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. sosialisasi ini dilaksanakan langsung oleh Kemensos melalui Dinas Sosial kepada seluruh masyarakat Kota Medan yang menerima BPNT.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa Masyarakat di Kota Medan masih banyak yang belum melaporkan diri kepada Dinas Sosial untuk di data sebagai penerima bantuan tersebut. Hal ini menjadikan Masyarakat kurang mampu di Kota Medan belum mendapatkan bantuan secara keseluruhan dan menghambat proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan mengatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke Dinas Sosial menjadi salah satu faktor penghambat penyaluran bantuan tersebut secara merata kepada Masyarakat di Kota Medan, dimana pada saat bantuan tersebut di salurkan masih banyak terdapat Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan melakukan protes kepada pemerintah padahal mereka belum mendaftarkan diri ke Dinas Sosial Kota Medan.

3.5 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan

Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan:

1. Upaya dalam Meningkatkan Sosialisasi yang Belum Optimal

Upaya pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi yang belum optimal dengan cara memberikan penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah Kota Medan dapat melakukan beberapa upaya strategis. Pertama, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi BPNT melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, sosial media, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Sosialisasi yang terarah dan menyeluruh akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program BPNT dan manfaatnya bagi peserta. Selanjutnya, perlu dilakukan pelatihan bagi petugas yang bertugas dalam sosialisasi BPNT agar dapat menyampaikan informasi secara efektif dan persuasif kepada masyarakat. Pelatihan ini juga dapat membantu petugas dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan kebingungan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat terkait program BPNT. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan media massa, juga dapat memperkuat upaya sosialisasi BPNT. Melalui kerja sama yang baik, informasi tentang program BPNT dapat disampaikan secara luas dan tepat kepada masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya ini secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan sosialisasi BPNT di Kota Medan dapat meningkat dan akhirnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran Masyarakat, agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap peraturan yang menjadi syarat agar bisa mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai tersebut dengan cara lebih memperhatikan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengimbau dan mengajak Masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi syarat untuk menerima bantuan dengan cara memberikan sosialisasi secara langsung maupun melalui online. Kemudian pemerintah Kota Medan juga dapat melakukan beberapa upaya strategis. Pertama, mereka bisa meningkatkan kampanye penyuluhan dan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan pertemuan komunitas. Pesan-pesan yang jelas dan relevan perlu disampaikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan kota. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat secara lebih langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan melalui penyelenggaraan forum-forum partisipatif, dialog terbuka dengan warga, atau pembentukan kelompok kerja yang melibatkan perwakilan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pemerintah Kota Medan juga dapat mendorong

partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi individu atau kelompok yang aktif berkontribusi dalam pembangunan kota. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan publik, fasilitas tambahan, atau manfaat lain yang dapat memotivasi partisipasi aktif. Dengan melakukan langkah-langkah, diharapkan kesadaran masyarakat dalam program-program pemerintah Kota Medan dapat meningkat, sehingga upaya pembangunan kota dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Hasil Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2020) yang dimana penelitian ini lebih membahas ke cara menggunakan transaksi non tunai dengan menerapkan e-warong kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kemudian penelitian Nurmalita sari (2020) lebih membahas ke pelaksanaan penyaluran bantuan yang telah baik sehingga program ini dianggap berhasil menjangkau sasaran yang tepat. Kemudian pada penelitian sari et al (2019) membahas masalah implementasi kebijakan terutama terkait dengan mesin EDC, keuangan, dan ketersediaan dana yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan ukuran kebijakan.

Diskusi temuan utama penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan optimal dijelaskan secara deskriptif melalui empat indikator, berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Terdapat kekurangan pada indikator komunikasi dan sumber daya berupa rendahnya kesadaran masyarakat yang menghambat proses implementasi. Kemudian dalam penelitian ini kemiskinan di Kota Medan masih cukup tinggi dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak tepat sasaran yang membuat hal ini menjadi suatu permasalahan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan teori George C. Edward III belum berjalan dengan optimal, seperti indikator sumber daya manusia telah mencapai tingkat keberhasilan yang baik, kemudian pada indikator disposisi, sikap responsif para pelaksana kebijakan dalam mendukung program Bantuan Pangan Non Tunai telah menunjukkan kemauan,

kemampuan, dan tanggung jawab yang memadai. Sikap implementor juga dapat dipengaruhi oleh insentif atau keuntungan yang mereka peroleh, yang dapat meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas. Selanjutnya pada indikator struktur birokrasi telah diatur secara hierarki berdasarkan SOP peraturan yang berlaku sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Terakhir pada indikator komunikasi belum maksimal karena masih banyaknya informasi dan sosialisasi yang belum tersebar luas kepada masyarakat miskin secara langsung, yang sebenarnya merupakan hal yang penting agar masyarakat tersebut tau apa program tersebut. Kemudian pada kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya untuk mengetahui program BPNT. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang mengatur dan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Kemudian, terdapat faktor penghambat, seperti sosialisasi yang belum optimal dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kemudian upaya Pemerintah dalam Mengatasi Faktor Penghambatnya, yaitu dalam meningkatkan sosialisasi yang belum maksima, yaitu dengan melakukan beberapa upaya strategis. Pertama, peningkatan intensitas sosialisasi BPNT melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, sosial media, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, memberikan pelatihan bagi petugas yang bertugas dalam sosialisasi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan media massa, juga dapat memperkuat upaya sosialisasi BPNT. Kemudian upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan mengimbau dan mengajak Masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi syarat untuk menerima bantuan dengan cara memberikan sosialisasi secara langsung maupun melalui online, kemudian melibatkan masyarakat secara lebih langsung dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi individu atau kelompok yang aktif berkontribusi dalam pembangunan kota.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George C. Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial Kota Medan dan seluruh pihak terkait atas bimbingan dan dukungan penuh, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. (2023). Jumlah Penduduk Kota Medan. <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
- Baharuddin Thahir. 2019. Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Kebijakan Pemerintahan.
- BPS. (n.d.). Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara. In *Badan Pusat Statistik, 2018*. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- Idzhar Nurcahyo. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako. 950.
- Khasanah, K. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- Kota Medan Dalam Angka, P. M. (2024). Kota Medan Dalam Angka.
- Nurmalita Sari, A. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Studi di Kelurahan Sungailiat. 282.
- Perpres. (2015). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. 151, 10–17.
- Perwal Nomor 22 Tahun 2022. (n.d.).
- Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Medan, M. (2024). Renstra Dinas Sosial Kota Medan.

Sari, A. E., Kusbandrijo, B., & Murti, I. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). 126–132. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/43.pdf>

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta* (Cet. 19). Bandung:IKAPI.

Waris, et. al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *Rake Sarasini* (Cetakan Pe, Issue Maret). Padang:IKAPI.<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>

Yulianto, T. (2022). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.

Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>

